

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta

_____, 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, LBH Jakarta, Jakarta

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta

Frans Hendra Winarta, 2009, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama

_____, 2011, *bantuan Hukum di Indonesia, Hak Untuk Didampingi Penasehat hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elek Media Komputindo, Jakarta

H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta

M Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Sinar Grafika

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum*

Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta

V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Provesi Advokat*, Erlangga, Yogyakarta

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung

B. Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyelenggaraan Dana Bantuan hukum Cuma-Cuma.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009

C. Jurnal/Skripsi/Tesis

Herning Setyowati dan Nurul Muchiningtias, *Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam perspektif Hak Asasi manusia*, Jurnal Hukum, 2018, Vol. 2 No. 2, Universitas Negeri Semarang,

Muhammad Musa Surin, Tesis, Judul “*Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Pontianak)*”, 2007

Sri Rahayu Wilujeng, “*Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*”, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang

D. Website

H. Andi Ferry Mulyanuddin, *Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Bagi Keadilan Dan Kesetaraan Dimuka Hukum*, diakses dari, <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>